

# Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pengembang Ekonomi Lokal Melalui Sistem Kemitraan Bisnis Islam Berbasis *Mompreneur*

Rita Yuliana<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo

## Abstrak

Pemerintah memiliki perhatian utama dengan pemberdayaan Masyarakat Ekonomi. Hal ini terkait dengan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan harta benda dari rakyat mereka. Ada banyak program yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi Masyarakat dibanyak model. Namun, dalam kenyataannya, model ini tidak cukup komprehensif dan hal ini menyebabkan tidak optimalnya. Jadi, untuk meningkatkan model, tulisan ini berisi eksplorasi model alternatif pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Dengan membangun model baru, kami berharap bahwa semua sumber daya yang digunakan dapat diatur secara efektif dan efisien, dan membantu pemerintah untuk menumbuhkan harta benda dari rakyat mereka. Model ini mencakup banyak faktor.

**Kata kunci:** ekonomi keluarga, model pemberdayaan, strategi berbasis lokal, bisnis islam, ibu yang berwirausaha

## Abstract

*Government has a main concern with economic community empowerment. It is related with the duty of government to develop the wealth of their people. There are a lot of programs related with economic community empowerment in many models. But, in fact, those models are no comprehensive enough and it caused unoptimum result. So, in order to improve those models, this paper contains an exploration of an alternative model of economic community empowerment. By constructing the new model, we hope all of resources that have been used can be managed in effective and efficient way, and it will help the government to grow the wealth of their people. This model includes many factors.*

**Keywords:** Family economic empowerment model, locally based strategy, Islamic bussiness, mompreneur

Telah banyak program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut ada yang dirancang untuk memfasilitasi peluang berwirausaha, misalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selama ini, program pemberdayaan ekonomi pemerintah berfokus pada penyediaan modal dan pelatihan-pelatihan. Seperti pengalaman peneliti yang telah melakukan beberapa proyek pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) dan Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG). Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi dengan berbasis potensi lokal. Pemerintah menyediakan dana dan juga

pendamping (yang berasal dari akademisi). Pelaksanaan program tersebut berjalan pola yang monoton. Pada umumnya, dana bantuan dikelola melalui mekanisme simpan pinjam biasa. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan dana untuk benar-benar mencetak wirausahawan yang handal. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya komponen pendukung program, seperti ketersediaan jaringan usaha, pendampingan yang intens, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh program pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masih ada program-program lain yang modelnya serupa, atau bahkan yang lebih sederhana, misalnya pemberian pinjaman modal baik yang disertai pelatihan ataupun tidak.

Berdasarkan beberapa pengalaman dan pengamatan tersebut, maka terdapat beberapa catatan penting sebagai bahan evaluasi. Sebagaimana diketahui selain

---

<sup>1</sup> Korespondensi: R. Yuliana, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal Madura, telp: 031-



modal dan keterampilan, calon wirausahawan juga memerlukan hal-hal lain yang mendukung. Guna mengatasi kendala tersebut, maka diajukanlah sebuah model pemberdayaan ekonomi alternatif yang lebih komprehensif.

Wacana tentang pemberdayaan ekonomi keluarga ini diusulkan sebagai bentuk kepedulian atas permasalahan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini mengingat bahwa masalah tersebut memerlukan penanganan dari berbagai pihak, termasuk akademisi sebagai bagian dari masyarakat.

Terkait dengan upaya tersebut, pemerintah juga menghimbau kepada berbagai pihak terutama masyarakat dan pengusaha untuk berperan secara optimal. Harapannya adalah bahwa dengan keterlibatan mereka akan bisa mendorong perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemikiran ini diusulkan sebagai bentuk perumusan alternatif model pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis. Desain yang diajukan dalam model ini melibatkan tiga pihak penting, yaitu masyarakat (para ibu), pengusaha, dan pemerintah. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen inti dalam pemberdayaan masyarakat, dengan demikian tujuan pemerintah terkait dengan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dapat tercapai.

Upaya perubahan yang bersifat sistemik dalam model ini diakomodasi dalam bentuk keterkaitan yang terpadu antara ketiga pihak, yaitu masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Ketiga pihak tersebut masing-masing memiliki peran penting. Secara umum, pemerintah berperan sebagai pengawas dan fasilitator, pengusaha berperan sebagai pendamping profesional, dan masyarakat (dalam penelitian ini adalah ibu-ibu) berperan sebagai pelaku usaha. Keterkaitan pihak-pihak tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah model pemberdayaan ekonomi yang sistematis.

Model yang diajukan dalam tulisan ini juga mempertimbangkan kemungkinan pencapaian perubahan yang bersifat menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan melalui pemilihan metode kemitraan bisnis. Metode kemitraan ini melibatkan pengusaha dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan akan membawa kemajuan pada kedua pihak. Pengusaha akan mendapatkan perluasan jaringan bisnis sehingga akan memperbesar usaha mereka. Pada sisi lain, masyarakat akan mendapatkan paket bisnis beserta pemandunya, sehingga akan mempermudah mereka untuk

menjalankan usahanya. Dengan demikian, hubungan kedua pihak tersebut akan saling menguntungkan.

Guna menghindari adanya ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam hubungan kemitraan tersebut, maka pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Tugas utama pemerintah dalam model ini adalah sebagai pengawal yang mengantar pada kebaikan semua pihak.

Model ini melibatkan ibu-ibu sebagai sasaran program. Hal tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa model ini diharapkan mampu menciptakan perubahan yang menyeluruh. Peran ibu, baik dalam keluarga maupun masyarakat, sangatlah penting. Ibu berperan dalam mencetak generasi dan budaya. Oleh karena itu, ketika ibu-ibu tersebut berwirausaha maka ia akan dapat mendidik keluarga dan masyarakat untuk menjadikan wirausaha sebagai salah satu bagian dalam gaya hidup mereka.

### **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Yatmo, 2000).

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial nonekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (2002), pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan,

akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang memengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Komite Penanggulangan Kemiskinan, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

### Basis Ekonomi Lokal

Meskipun pendekatan lokal dalam pengembangan ekonomi semakin menarik perhatian negara-negara sedang berkembang, sampai kini belum ada suatu definisi yang disepakati secara luas. Tetapi inisiatif pengembangan ekonomi lokal tidak perlu menunggu adanya suatu definisi yang disepakati secara luas tersebut, karena mungkin tidak akan pernah ada. Yang lebih penting adalah sebuah definisi kerja yang dapat dipegang sebagai acuan arah dan garis-garis besar cakupan programnya.

Pengembangan ekonomi lokal seyogianya tidak dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Berikut ini dikemukakan arah tujuan dan cakupan inisiatif pengembangan ekonomi lokal menurut perspektif GTZ (2004) dalam Dendy, *et.al* (2004): (1) Mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan kerja, (2) Mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia secara lebih baik, (3) Menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan, (4) Serta mengembangkan peluang-peluang baru bagi bisnis.

Sebagai perbandingan berikut ini dikutip definisi pengembangan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2004) dalam Dendy, *et.al* (2004), yakni: "...suatu proses di mana sektor publik, bisnis dan non-pemerintah bekerja sama menciptakan kondisi-kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja."

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan

pemeran pemangku kepentingan ekonomi, yakni pemerintah daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan (stimulasi) ekonomi daerah. Pendekatan tersebut menekankan kewenangan lokal (*local control*), menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan kelembagaan. Dengan demikian, kemitraan pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan upaya mobilisasi para aktor, organisasi dan sumber daya, serta pengembangan kelembagaan baru melalui dialog dan kegiatan-kegiatan strategik.

### Bisnis Islami

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Bisnis adalah segala kegiatan produsen untuk memproduksi dan memasarkan barang/jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba (*profit*) (Straub ♦♦ Attner, 1994) dalam Yusanto dan Widjajakusuma (2002).

Dalam Islam setiap pemeluk diwajibkan, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk "bekerja". Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan). Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Ahmad yang artinya:

*"Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai lima perkara: tentang umurnya, apa yang dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; tentang hartanya, darimana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu".*

Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya di mana terdapat aturan halal dan haram (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002).

Dalam Islam terdapat kaidah ushul "al-aslu fi al-af'al at-taqayyud bi hukmi asy syar'I" yang berarti

bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara': wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis organisasi bisnis.

Menurut Gymnastiar dan Kertajaya (2003), dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu:

Target hasil: profit-materi dan benefit non materi

Tujuan perusahaan harus tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal organisasi, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Pertumbuhan

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit dan benefitnya. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya.

Keberlangsungan

Pertumbuhan target hasil yang telah diraih harus terus dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama.

Keberkahan

Pengelola bisnis perlu mematok orientasi keberkahan berupa ridha Allah swt, sehingga dipenuhi dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntunan syariah.

### Karakteristik Bisnis Islami vs Bisnis Konvensional

Karakter Bisnis	Islami	Konvensional
Asas	Aqidah Islam (Nilai-nilai transcendental)	Sekulerisme (Nilai-nilai material)
Motivasi	Dunia – akhirat	Dunia
Orientasi	Profit dan Benefit (Non materi), Pertumbuhan, Keberlangsungan, Keberkahan	Profit, Pertumbuhan, Keberlangsungan.
Etos Kerja	Tinggi, Bisnis adalah bagian dari ibadah	Tinggi, Bisnis adalah kebutuhan duniawi
Sikap Mental	Maju dan produktif, Konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	Maju dan Produktif sekaligus konsumtif, Konsekuensi aktualisasi diri
Keahlian	Cakap dan ahli di bidangnya, Konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Cakap dan ahli di bidangnya, Konsekuensi dari motivasi reward dan punishment
Amanah	Terpercaya dan bertanggung jawab, Tujuan tidak menghalalkan cara	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), Tujuan menghalalkan cara
Modal	Halal	Halal dan Haram
SDM	Sesuai dengan akad kerjanya	Sesuai dengan akad kerja atau sesuai dengan keinginan pemilik modal
Sumber Daya	Halal	Halal dan haram
Manajemen Strategik	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka
Manajemen Operasi	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran. Mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran. Mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.
Manajemen Keuangan	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan
Manajemen Pemasaran	Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Pemasaran menghalalkan segala cara
Manajemen SDM	SDM profesional dan berkepribadian Islami, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah swt	SDM profesional, sebagai faktor produksi, bertanggung jawab pada diri dan majikan

Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan Islam mempunyai beberapa perbedaan dengan bisnis konvensional. Syafii (2001) mengemukakan perbedaan tersebut dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

*National Association of Women Business Owners*, terdapat lebih dari 10 juta bisnis yang dimiliki oleh kaum perempuan di Amerika Serikat dan jumlahnya meningkat terus setiap tahunnya.

**Mompreneur**

Belakangan tren *mompreneur* semakin merebak diberitakan berbagai media. Tidak hanya ibu rumah tangga saja, bahkan ibu yang berstatus karyawan pun tergerak untuk berhenti kerja dan memilih berbisnis dari rumah. Banyak juga dari mereka yang rela meninggalkan posisi selevel manajer untuk lebih fokus dibisnisnya. Ingin lebih dekat dengan buah hati tapi tetap berpenghasilan adalah motivasi kuat para *mompreneur* ini.

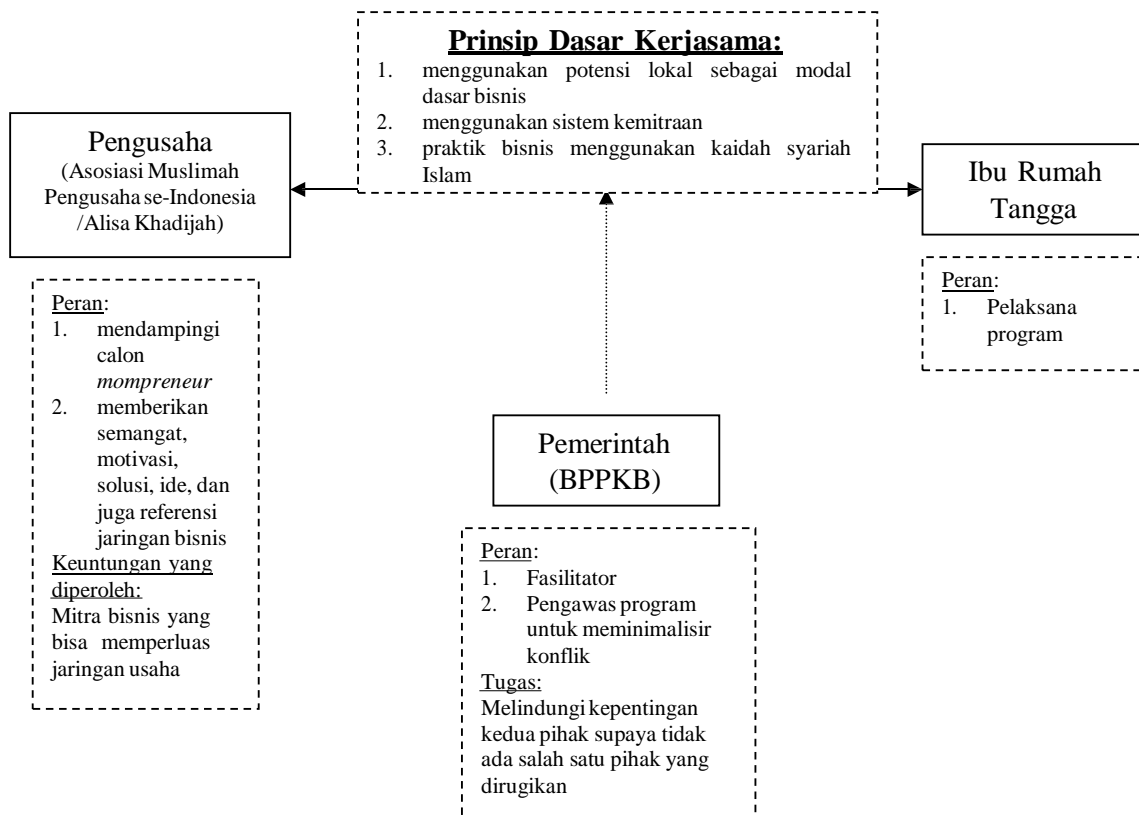
*Mompreneur* merupakan gabungan dua kata, yaitu *mom* yang berarti ibu dan *preneur* yang berasal dari kata *entrepreneur* atau berwirausaha. Dengan demikian *mompreneur* berarti ibu yang berwirausaha atau memiliki usaha sendiri. *Mompreneur* merupakan istilah bagi ibu-ibu yang ingin mengukir prestasi di bidang usaha, mengasah berbagai potensi diri, dan memiliki kemandirian finansial sehingga tidak bergantung pada suami (Wikipedia, 2010). Menurut

**Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pengembang Ekonomi Lokal Melalui Sistem Kemitraan Bisnis Islam Berbasis Mompreneur**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang model pemberdayaan ekonomi yang diusulkan, berikut skema model pemberdayaan secara ringkas:

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam model pemberdayaan ini, yaitu pemerintah, pengusaha dan calon *mompreneur* (pebisnis ibu rumah tangga). Identifikasi pihak-pihak tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa model pemberdayaan ekonomi ini selain mencetak *mompreneur*, lebih lanjut juga dimaksudkan untuk membentuk budaya kewirausahaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan budaya tersebut melibatkan pemerintah sebagai pihak yang mengawal program. Pemerintahlah yang berperan sebagai perantara antara pengusaha dengan calon *mompreneur*. Pemerintah bertugas melindungi kepentingan kedua



pihak supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pemerintah, model pemberdayaan ini bisa menjadi salah satu pilihan dalam pelaksanaan tugas mereka terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pengusaha dilibatkan dalam program ini sebagai pihak yang mendampingi calon *mompreneur*. Hal ini dimaksudkan supaya calon *mompreneur* memperoleh pendamping yang profesional dan bisa memberikan solusi atas permasalahan mereka. Selain itu, pengusaha juga memperoleh keuntungan dalam program ini. Mereka akan memperoleh mitra bisnis yang bisa memperluas jaringan usaha, sehingga bisa memperbesar usaha mereka. Kondisi tersebut diharapkan akan memicu pengusaha untuk memberikan pendampingan yang maksimal sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak.

Berikut disajikan studi kasus tentang implementasi Program P3EL yang digagas oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Program P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dengan adanya kegiatan P3EL diharapkan akan dapat menumbuhkembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan dan berbasis pada sumber daya lokal yang tersedia.

Terkait dengan pelaksanaan program tersebut, terdapat pembelajaran utama yang perlu dicermati. Hal itu antara lain adalah ditunjuknya perguruan tinggi sebagai pendamping program. Sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan, pendamping bertugas untuk memfasilitasi dan memediasi pengembangan Program P3EL.

Kapasitas perguruan tinggi untuk menjadi pendamping perlu dikritisi. Pada umumnya, pendamping yang ditunjuk masih belum memiliki kemampuan apalagi pengalaman dalam menjalankan sebuah usaha. Hal ini dimaklumi karena para pendamping adalah para dosen yang pekerjaan utamanya memang tidak fokus ke bidang kewirausahaan.

Hal yang terjadi kemudian adalah para pendamping kurang bisa langsung terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Tentu yang menjadi penyebab adalah kekurangmampuan mereka dalam memfasilitasi semua kebutuhan akan pengembangan program P3EL. Pendamping dituntut untuk bisa menjadi tempat

rujukan setiap permasalahan, bahkan yang sangat teknis sekalipun. Ini dapat dimaklumi karena memang yang dihadapi adalah langsung realita di lapangan di mana suatu usaha dijalankan. Dengan demikian, harusnya pendamping bisa memberikan solusi yang jitu pada saat itu juga. Bahkan jika memungkinkan dan ini diharapkan, bisa memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha, misalnya bisa merekomendasikan jaringan pemasarannya.

Selain itu, kendala lain yang ditemui di lapangan adalah pendamping masih belum percaya diri. Berdasarkan penuturan mereka, pendamping masih belum punya pengalaman dalam mengelola usaha sehingga mereka kesulitan ketika menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Seharusnya, pendamping selain dituntut untuk bisa memberikan berbagai solusi bisnis/usaha, mereka juga mampu memberikan semangat, motivasi, ide, dan bahkan referensi jaringan bisnis. Dengan demikian, tugas pendampingan menjadi lebih optimal dan bahkan bisa melampaui yang diprogramkan. Oleh karena, posisi perguruan tinggi sebagai pendamping, perlu dievaluasi efektivitasnya.

Program P3EL juga bersifat *hit and run*, tidak memperhatikan keberlanjutan program. Artinya, program ini berjalan dalam kurun waktu tertentu, yakni 1 tahun anggaran. Bisa jadi, ketika program ini selesai diimplementasikan, maka selesailah juga kegiatan para perempuan tersebut. Hal ini dimaklumi karena pihak yang paling berkepentingan dengan program ini adalah pemerintah. Sesuai dengan fakta di lapangan, program P3EL banyak menemui kendala terutama terkait dengan permasalahan birokrasi. Mulai dari batasan wewenang dan tanggung jawab yang tidak jelas, macetnya pencairan dana, hingga kurangnya pengawasan.

Program P3EL pada tahun 2009 berjalan tersendat. Berdasarkan data di lapangan, jadwal pelaksanaan program berjalan tidak sesuai dengan skema. Misalnya di Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan, musyawarah desa dilaksanakan pada bulan Juli, selanjutnya sosialisasi program dilakukan pada bulan Agustus, dan ujungnya yaitu pencairan dana direalisasikan pada bulan Januari 2010. Artinya, program tahun 2009 baru bisa berjalan pada tahun 2010. Sedangkan laporan kegiatan harus selesai pada akhir tahun 2009. Sungguh sebuah praktik yang tidak realistis. Berdasarkan fakta ini pemerintah juga harus mengevaluasi programnya, apakah model seperti P3EL ini masih layak untuk dipertahankan, atau paling tidak pemerintah bisa memberikan catatan untuk memperbaikinya supaya program ini lebih optimal.

Penentuan bidang bisnis yang akan dijalankan oleh peserta P3EL juga perlu dicermati. Sesuai dengan judul program, maka bidang usaha yang dipilih adalah yang sesuai dengan potensi lokal. Berdasarkan hasil penelitian, dari 7 desa tempat implementasi program, bidang usaha yang dipilih adalah usaha simpan pinjam. Ketiga desa tersebut adalah Desa Pademawu Kabupaten Pamekasan, Desa Bulukagung Kabupaten Bangkalan, dan Desa Pacanggean Kabupaten Sampang. Sedangkan di desa Romben Barat Kabupaten Sumenep, potensi desa memang telah dipilih sebagai bidang usaha. Ada dua jenis usaha produktif di desa Romben Barat yakni gula siwalan (tegalan) dan rumput laut (pesisir). Fakta ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah untuk mengangkat potensi lokal untuk dikembangkan menjadi lahan bisnis. Perlu proses yang itu tidak hanya bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek, misalnya 1 tahun saja.

Berdasarkan studi kasus program P3EL tersebut, maka peneliti mengajukan model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan bisa menyempurnakan model yang telah ada. Terkait dengan upaya tersebut, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *action research*.

Model pemberdayaan ekonomi dalam tulisan ini merupakan *improvement* yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Model ini dianggap efisien karena sumber daya yang diperlukan dalam program ini diupayakan dapat dikelola dengan baik. Misalnya, modal usaha yang diberikan kepada calon pengusaha tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Modal diberikan dalam bentuk paket usaha yang memposisikan calon pengusaha (dalam hal ini *mompreneur*) sebagai pelakunya. Selain itu, model ini juga melibatkan pengusaha sebagai mitra bisnis. Posisi mitra bisnis dalam model ini menjadi penting karena mereka yang bertugas sebagai pemandu para calon *mompreneur* dalam menjalankan bisnisnya. Keberadaan pengusaha yang telah berpengalaman sebagai mitra diharapkan dapat memberikan semangat, motivasi, solusi, ide, dan juga referensi jaringan bisnis yang diperlukan oleh *mompreneur* dalam menjalankan bisnisnya.

Model ini juga mempertimbangkan faktor efektivitas. Oleh karena itu, beberapa kekurangan yang ada dalam program pemberdayaan ekonomi sebelumnya menjadi catatan penting untuk selanjutnya disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga,

melibatkan pengusaha sebagai mitra bisnis, menggunakan prinsip bisnis Islami, dan menjadikan ibu rumah tangga sebagai pelaku bisnis.

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya (Yatmo, 2000).

Model pemberdayaan ini juga mempertimbangkan potensi ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan pemeran (*stakeholders*) ekonomi, yakni pemerintah daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan (stimulasi) ekonomi daerah. Pendekatan tersebut menekankan kewenangan lokal (*local control*), menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan kelembagaan. Dengan demikian, kemitraan pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan upaya mobilisasi para aktor, organisasi dan sumber daya, serta pengembangan kelembagaan baru melalui dialog dan kegiatan-kegiatan strategik (Helmsing, 2001).

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi ditempuh dengan menggunakan strategi kemitraan bisnis. Strategi tersebut dipilih sebagai alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan program pemberdayaan ekonomi yang ada. Pada umumnya program pemberdayaan ekonomi pemerintah berfokus pada penyediaan modal dan pelatihan-pelatihan. Padahal selain modal dan keterampilan, calon wirausahawan juga memerlukan ide-ide bisnis, jaringan, dan juga pengalaman. Guna mengatasi kendala tersebut, maka diajukanlah strategi kemitraan bisnis. Pengusaha dilibatkan dalam model ini sebagai mitra bisnis calon wirausahawan. Pengusaha bertugas untuk mengawal calon pelaku usaha tersebut menuju kemandirian ekonomi (Jafar, 1999).

Selain pengusaha, model ini juga melibatkan pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pihak yang bertugas memberikan fasilitator dan juga sebagai pengawas program (Sumarto *et al.*, 2004). Fasilitas



yang diberikan oleh pemerintah dalam model ini antara lain berupa modal kerja bagi calon *momprenneur*. Pemerintah juga berfungsi sebagai pengawas program. Hubungan kemitraan antara *momprenneur* dengan pengusaha harus dalam pengawasan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik antara keduanya. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya, pelaksanaan model ini menggunakan kaidah bisnis berdasarkan syariah Islam. Hal ini disebabkan keunggulan muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan (Syafi'i, 2003, 7).

Model pemberdayaan ekonomi yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan basis *momprenneur*. *Momprenneur* merupakan julukan bagi kelompok ibu-ibu pebisnis (Susindra, 2009). Terkait dengan ekonomi keluarga, *momprenneur* memiliki andil yang cukup besar. Selain pertimbangan materi, seorang *momprenneur* diharapkan akan mendidik keluarga dan lingkungannya untuk menjadi pengusaha yang handal.

## Kesimpulan

Model pemberdayaan ekonomi yang ada selama ini meski semakin marak, akan tetapi masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Model yang diajukan dalam tulisan ini merupakan salah satu usulan model pemberdayaan ekonomi yang diharapkan bisa memberikan alternatif pemberdayaan ekonomi. Model ini disusun secara lebih komprehensif dengan melibatkan tiga pihak penting, yaitu pemerintah, *momprenneur*, dan pengusaha. Ketiga pihak tersebut mempunyai peran yang penting dan saling melengkapi sehingga akan mengurangi ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang ada selama ini. Hanya saja, model yang diajukan ini masih dalam tahap wacana. Oleh karena itu diperlukan langkah lebih lanjut untuk mengkaji dan juga mengujicobakan model ini demi perbaikan menuju ke kesempurnaan.

## Daftar Pustaka

- Dendi, Astia, Heinz- Josef Heile, Mahman, Rukyatil Hilaliyah, Rifai Saleh Haryono, (2004) *Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara*, Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- Gymnastiar, Abdullah., Kertajaya, Hermawan. (2003) *Berbisnis dengan Hati*, Asia Inc, Edisi Agustus.
- Helmsing, A.H.J. (2001) *Local Economic Development: New Generations of Factors, Policies and Instruments*. Paper dipresentasikan pada Cape Town Symposium.
- Jafar, Muhammad Hafsa. (1999) *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. (2002) *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*. Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2005) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sumarto, Sudarno, Suryahadi, Asep, Arifianto, Asep. (2004) *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*, Makalah dari Lembaga Penelitian SMERU.
- Susindra, Susi. (2009) *Belajar Jadi Momprenneur*, Majalah Gatra.
- Wickham, A.P. (2001) *Strategic Entrepreneurship: A Decision Making Approach to New Venture Creation and Management*. 2<sup>nd</sup> edition. Pearson Education Limited. Harlow, England.
- Y a t m o , M a r d i H u t o m o . ( 2 0 0 0 ) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi*, Naskah No. 20.
- Yusanto, M. Ismail, Widjajakusuma, M. Karebet. (2002) *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.